

BANK SENTRAL DAN KEBIJAKAN MONETER ISLAM YANG SESUAI DENGAN PRINSIP SYARIAH

Oleh:

Saiful Arif¹

Julia Eka Firmanda²

Nadhirotul Jannah³

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, Jawa Timur (69162)

Korespondensi Penulis: saifulariff21@gmail.com

Abstract. *Islamic monetary policy represents an approach consistent with Sharia principles in regulating the financial system. Central banks play a pivotal role in implementing monetary policies that adhere to these principles. This article aims to explore the role of central banks in the context of Islamic monetary policy. Through literature analysis, this research presents an in-depth understanding of how central banks can operate within the Sharia framework, including the use of halal policy instruments and adherence to principles of economic justice. The discussion also encompasses concepts such as currency value stability, fair income distribution, and inflation control consistent with Sharia principles. Additionally, the article highlights challenges faced by central banks in implementing Islamic monetary policy, including uncertainty in assessing the halal status of financial instruments and building appropriate regulatory frameworks. With a better understanding of the role of central banks in the context of Islamic monetary policy, it is hoped to assist governments and financial practitioners in developing financial systems more aligned with Sharia values.*

Keywords: *Central Bank, Islamic Monetary Policy, Sharia Principles.*

Abstrak. Kebijakan moneter Islam merupakan pendekatan yang konsisten dengan prinsip-prinsip syariah dalam pengaturan sistem keuangan. Bank sentral memegang peran

BANK SENTRAL DAN KEBIJAKAN MONETER ISLAM YANG SESUAI DENGAN PRINSIP SYARIAH

sentral dalam menerapkan kebijakan moneter yang sesuai dengan prinsip-prinsip ini. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran bank sentral dalam konteks kebijakan moneter Islam. Melalui analisis literatur, penelitian ini menyajikan pemahaman mendalam tentang bagaimana bank sentral dapat beroperasi dalam kerangka syariah, termasuk penggunaan instrumen-instrumen kebijakan yang halal dan mematuhi prinsip keadilan ekonomi. Diskusi juga mencakup konsep-konsep seperti kestabilan nilai mata uang, distribusi pendapatan yang adil, dan pengendalian inflasi yang konsisten dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, artikel ini menyoroti tantangan-tantangan yang dihadapi oleh bank sentral dalam menerapkan kebijakan moneter Islam, termasuk ketidakpastian dalam menilai kehalalan instrumen keuangan dan membangun kerangka pengawasan yang sesuai. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang peran bank sentral dalam konteks kebijakan moneter Islam, diharapkan dapat membantu pemerintah dan praktisi keuangan untuk mengembangkan sistem keuangan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Kata Kunci: Bank Sentral, Kebijakan Moneter Islam, Prinsip Syariah.

LATAR BELAKANG

Dalam era globalisasi yang berkembang pesat, sistem keuangan modern terus beradaptasi dengan nilai-nilai etika dan agama sebagai respons terhadap kompleksitas dan dinamika pasar global. Salah satu pendekatan yang semakin mendapatkan perhatian adalah kebijakan moneter Islam, yang didasarkan pada dasar-dasar syari'ah dalam sebuah aktivitas *financial* (Rohim, 2011). Konsep dasar ini mencakup aturan terhadap larangan *ribawi* (bunga), spekulasi, dan transaksi yang tidak jelas atau tidak jelas risikonya (Adiwarman, 2010). Sebagai gantinya, kebijakan moneter Islam menekankan aspek-aspek seperti keadilan ekonomi, stabilitas nilai mata uang, distribusi pendapatan yang adil, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam situasi seperti ini, bank nasional atau bank pusat (*centra bank*) memegang peran yang signifikan dalam menerapkan kebijakan pengeluaran uang (moneter) yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Sutawijaya, 2020). Sistem moneter diatur dan diawasi oleh bank sentral lembaga yang bertanggung jawab atas hal itu. Mereka memiliki kewenangan untuk mengeluarkan dan mengatur uang kertas, mengendalikan suplai uang,

serta mengatur suku bunga dan kebijakan lainnya yang memengaruhi ketersediaan uang dan nilai mata uang (Hapsari dkk, 2021).

Dalam konteks kebijakan moneter Islam, bank sentral perlu memastikan bahwa kebijakan yang mereka terapkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Ini melibatkan penggunaan instrumen kebijakan yang halal dan memastikan bahwa aktivitas keuangan yang diawasi dan diatur oleh bank sentral sesuai dengan hukum Islam (Rahardja & marunung, 2008). Contoh dari instrumen kebijakan yang halal termasuk *mudharabah* (bagian keuntungan dan kerugian), *musyarakah* (kerjasama), *murabahah* (pembiayaan dengan margin keuntungan tetap), dan *wakalah* (agen).

Selain itu, bank sentral dalam konteks kebijakan moneter Islam juga bertanggung jawab untuk menjaga nilai mata uang tetap stabil, distribusi pendapatan yang setara atau sesuai (adil), dan pengendalian inflasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mereka harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti kehalalan investasi, keadilan dalam alokasi sumber daya, dan perlindungan terhadap inflasi yang dapat merugikan masyarakat (Chapra, 1997).

Meskipun demikian, implementasi kebijakan moneter Islam oleh bank sentral tidaklah tanpa tantangan. Salah satu masalah atau tantangan penting (utama) yakni ketidakpastian dalam menilai kehalalan instrumen keuangan dan aktivitas ekonomi yang kompleks. Selain itu, membangun kerangka pengawasan yang juga sesuai dengan aturan-aturan prinsip dasar syari'ah menjadi tantangan yang signifikan bagi bank sentral (Barro, 2016).

Dengan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai peranan bank sentral di dalam konteks kebijakan moneter Islam, diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan wawasan terhadap pemahaman tentang implementasi kebijakan moneter Islam dan tantangan-tantangan yang terkait dengannya. Selain itu, hal ini juga dapat membantu pemerintah dan praktisi keuangan untuk mengembangkan pengendalian sistem keuangan yang lebih cocok dan sesuai dengan aturan dasar syariah (prinsip-prinsip dasar islam) dan memperkuat integritas serta stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

BANK SENTRAL DAN KEBIJAKAN MONETER ISLAM YANG SESUAI DENGAN PRINSIP SYARIAH

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki fungsi serta peranan bank pusat atau bank nasional (*central bank*) dalam implementasi kebijakan keuangan (moneter) islam, dengan fokus pada bagaimana bank sentral mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam kebijakan moneter mereka. Tujuan utama adalah untuk memahami peran bank sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan, sambil mematuhi prinsip-prinsip syariah seperti keadilan ekonomi, distribusi pendapatan yang adil, dan kontrol inflasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan, yang berarti bahwa penelitian akan berpusat pada bahan kepustakaan dengan meninjau *literatur review* yang terkait. Data teoretik yang di gunakan dalam studi penelitian ini berasal dari penelitian sebelumnya; penulis telah menyadur, mengutip, dan menggunakan berbagai sumber rujukan. Penulis menggunakan teknik pendekatan kepustakaan ini untuk memahami serta mengidentifikasi hubungan antara kebijakan moneter dan lembaga perbankan, bank nasional (BI) sebagai pemegang otoritas kebijakan keuangan (moneter). Dalam konteks ini penulis berusaha menemukan teks, mengklarifikasi serta menganalisa informasi teks yang di peroleh melalui data primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank Sentral

Lembaga keuangan yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi sistem keuangan negara disebut bank sentral (Permono,2001). Peran atau tugas utamanya adalah mengendalikan suplai uang dalam perekonomian, mempertahankan stabilitas nilai tukar mata uang, serta menjaga stabilitas harga. Bank sentral (*Central bank*) sering kali juga memiliki wewenang untuk menerapkan serta menetapkan aturan tentang kebijakan moneter (keuangan negara), termasuk membuat suku bunga dan mengawasi pasar terbuka (Wahyudi, 2013). Contoh bank sentral yang terkenal di beberapa negara: bank sentral di amerika serikat (*Federal Reserve*), Bank Sentral Eropa (ECB), dan bank sentral republik di indonesia yakni (BI) bank indonesia.

Bank nasional atau bank sentral adalah lembaga yang mempunyai peranan kunci dalam menjaga stabilitas dan mengendalikan sistem moneter dan keuangan suatu negara. Fungsi dari pada bank sentral meliputi pengaturan suku bunga, pengendalian suplai uang,

penerbitan uang kertas, serta pengawasan terhadap lembaga keuangan lainnya (Warjiyo & Solikin, 2016). Dalam konteks kebijakan moneter Islam, bank sentral juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan yang mereka terapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam penggunaan instrumen kebijakan yang halal dan mematuhi prinsip keadilan ekonomi (Sari, 2015).

Menurut (Lintangsari, 2018) Bank sentral (*Central bank*) adalah sebuah lembaga yang mempunyai peranan sentral dalam mengatur dan mengelola serta mengendalikan sistem moneter dan *financial* suatu negara, provinsi atau daerah. Fungsi dan peranan bank sentral sangat beragam, mulai dari pengaturan suku bunga dan pengendalian suplai uang hingga penerbitan uang kertas dan pengawasan terhadap lembaga keuangan lainnya. Peran bank sentral tidak hanya terpacu dan terbatas pada kebijakan moneter saja, melainkan juga mencakup beberapa macam aspek-aspek lain dari sistem keuangan, seperti stabilitas sistem pembayaran, kepatuhan terhadap peraturan dan standar internasional, serta pengelolaan cadangan devisa negara.

Menurut (Suni, 2020). Salah satu tugas tujuan utama dari bank sentral ialah menjaga stabilitas mata uang domestik. Untuk mencapai hal ini, bank sentral atau bank nasional menggunakan berbagai instrumen kebijakan, termasuk mengatur suku bunga, mempengaruhi suplai uang melalui kebijakan moneter, serta berpartisipasi dalam pasar valuta luar atau valuta asing. Stabilitas nilai mata uang penting untuk memastikan bahwa harga-harga barang dan jasa tetap stabil, memungkinkan transaksi ekonomi berlangsung lancar, dan mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain Menjaga stabilitas sistem keuangan: Bank sentral juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem keuangan suatu negara beroperasi secara stabil dan aman. juga bertanggung jawab untuk memastikan stabilitas sistem moneter secara keseluruhan (Hanoatobun, 2020). Ini melibatkan pengawasan terhadap lembaga-lembaga keuangan, evaluasi risiko-risiko sistemik, dan pengambilan tindakan pencegahan atau intervensi jika diperlukan untuk mencegah krisis keuangan. Bank sentral juga memainkan peran penting dalam menyediakan likuiditas kepada lembaga-lembaga keuangan dalam situasi darurat atau krisis likuiditas.

Selain fungsi-fungsi yang bersifat operasional, bank sentral juga sering menjadi penjaga stabilitas makroekonomi secara umum (Warjiyo & Juda, 2008). Mereka dapat memberikan analisis ekonomi dan saran kepada pemerintah tentang kebijakan fiskal dan

BANK SENTRAL DAN KEBIJAKAN MONETER ISLAM YANG SESUAI DENGAN PRINSIP SYARIAH

struktural yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pencapaian tujuan-tujuan makroekonomi seperti pertumbuhan GDP, penurunan tingkat pengangguran, dan stabilitas harga.

Dalam konteks kebijakan moneter Islam, bank sentral juga harus memastikan bahwa kebijakan yang mereka terapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini melibatkan penggunaan instrumen kebijakan yang halal, pemantauan aktivitas keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, dan mendorong perkembangan pasar keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam (Wahyudi, 2013).

Secara keseluruhan, bank sentral memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan stabilitas ekonomi dan keuangan suatu negara atau wilayah. Dengan mengatur dan mengendalikan sistem moneter dan keuangan, bank sentral berkontribusi pada pencapaian tujuan-tujuan ekonomi yang penting serta menjaga integritas dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan (Karim, 2001).

Kebijakan Moneter Islam

Kebijakan moneter Islam biasanya menerapkan pengawasan kuantitatif atas pinjaman dan menetapkan batas kredit, yang merupakan batas kredit tertinggi yang dapat diberikan bank komersial kepada pelanggan mereka. tujuan keuangan (Harun, 2015). Pemerintah kemudian memiliki wewenang untuk mempengaruhi cadangan bank komersial dengan menggunakan 4.444 giro. Bahwa bank sentral memengaruhi bank komersial secara langsung hampir sama dengan melakukan operasi pasar terbuka. Selain itu, untuk mengatasi masalah likuiditas, bank komersial harus membentuk kumpulan bersama untuk mengantisipasi atau mengamankan sejumlah simpanan yang dikelola berdasarkan kesepakatan. Kemudian, untuk memantau kekuatan dan masalah bank umum, berhubungan langsung, konsultasi, dan pertemuan dengan mereka (Hdi & roni, 2021). Hal ini memungkinkan bank sentral untuk memberikan nasihat yang tepat kepada mereka tentang cara mengatasi masalah perbankan untuk membantu mereka mencapai tujuan perbankan yang direncanakan.

Instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam dirancang untuk mempromosikan stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan keadilan sosial sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Chapra, 2000). Berikut adalah beberapa instrumen kebijakan moneter Islam yang umum digunakan:

- A. *Mudharabah* dan *Musyarakah*: Ini adalah kontrak bagi hasil di mana bank sentral atau lembaga keuangan Islam dapat menggunakan dana yang mereka kelola untuk berinvestasi dalam proyek-proyek ekonomi yang menghasilkan keuntungan (Ascarya, 2016). Keuntungan dari investasi ini kemudian dapat dibagikan antara pihak yang menyediakan dana (*depositor*) dan bank sentral atau lembaga keuangan yang melakukan investasi.
- B. *Murabahah*: *Murabahah* adalah transaksi jual beli dengan *markup* harga yang diungkapkan secara jelas kepada pembeli. Bank sentral atau lembaga keuangan Islam dapat menggunakan *murabahah* untuk memberikan pembiayaan kepada perusahaan atau individu untuk keperluan investasi atau konsumsi (Mansyur, 2011).
- C. *Wakalah* dan *Kafalah*: Ini adalah instrumen asuransi yang dapat digunakan oleh bank sentral atau lembaga keuangan Islam untuk melindungi investasi atau meminimalkan risiko yang terkait dengan transaksi keuangan (An-nabhani, 2005).
- D. *Sukuk*: *Sukuk* adalah instrumen keuangan syariah yang mirip dengan obligasi konvensional, tetapi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. *Sukuk* dapat digunakan oleh bank sentral atau lembaga keuangan Islam untuk menghimpun dana dari pasar modal dengan cara yang sesuai dengan hukum Islam (Danar 2016).
- E. Hukum *Al-Tawarruq*: Ini adalah instrumen keuangan yang memungkinkan seseorang atau perusahaan untuk mendapatkan dana tunai dengan cara membeli barang atau komoditas dengan harga murah secara kredit dan kemudian menjualnya dengan harga yang lebih tinggi secara tunai. Bank sentral atau lembaga keuangan Islam dapat menggunakan hukum *al-tawarruq* untuk memberikan pembiayaan kepada individu atau perusahaan (Sembodo, 2016).

Instrumen kebijakan moneter Islam yang digunakan oleh bank sentral atau lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang *riba* (bunga), spekulasi berlebihan, dan kegiatan yang dianggap tidak etis menurut hukum Islam (Manan, 2002). Dengan menggunakan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, bank sentral atau lembaga keuangan Islam dapat mempromosikan stabilitas ekonomi dan keadilan sosial dalam masyarakat Muslim.

BANK SENTRAL DAN KEBIJAKAN MONETER ISLAM YANG SESUAI DENGAN PRINSIP SYARIAH

Kebijakan Moneter Islam adalah pendekatan dalam pengaturan kebijakan moneter yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi Islam (Muhammad, 2005). Prinsip-prinsip ini mencakup larangan terhadap *riba* (bunga), spekulasi, dan transaksi yang mengandung ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*), serta menekankan keadilan ekonomi, distribusi pendapatan yang adil, dan pengendalian inflasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Hidayat, 2019).

Salah satu aspek utama dari kebijakan moneter Islam adalah pengelolaan suplai uang yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Ini melibatkan penggunaan instrumen kebijakan yang halal dan tidak melanggar larangan *riba*. Sebagai contoh, bank sentral dalam sistem keuangan Islam dapat menggunakan instrumen kebijakan seperti *mudharabah* (bagian keuntungan dan kerugian), *musyarakah* (kerjasama), *murabahah* (pembiayaan dengan margin keuntungan tetap), dan *wakalah* (agen) untuk mengatur suplai uang dan suku bunga (Maqrobi & Amin 2011).

Selain itu, kebijakan moneter Islam juga bertujuan untuk mencapai stabilitas nilai mata uang dengan mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi dan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli uang, mengatur suku bunga untuk mendorong investasi produktif, dan memastikan adanya distribusi pendapatan yang adil di masyarakat. Kebijakan moneter Islam juga menekankan pentingnya pembiayaan produktif dan investasi yang berkualitas (Irawan dan Sugiharso, 2005). Bank sentral dalam konteks kebijakan moneter Islam dapat mengembangkan instrumen keuangan yang memfasilitasi pembiayaan proyek-proyek yang berdampak positif bagi ekonomi dan masyarakat, seperti investasi dalam sektor riil, infrastruktur, dan pendidikan (Sutawijaya, 2019).

Selain aspek-aspek ekonomi, kebijakan moneter Islam juga memiliki dimensi sosial dan moral yang kuat. Prinsip keadilan ekonomi dan distribusi pendapatan yang adil ditekankan dalam setiap keputusan kebijakan moneter. Bank sentral dalam sistem keuangan Islam juga diharapkan untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat yang kurang mampu dan rentan, serta berperan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial dalam masyarakat (Karim, 2014).

Dengan demikian, kebijakan moneter Islam tidak hanya bertujuan untuk mencapai stabilitas ekonomi dan keuangan, tetapi juga untuk mempromosikan nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan keberlanjutan dalam aktivitas ekonomi. Melalui penerapan prinsip-

prinsip syariah dalam kebijakan moneter, diharapkan dapat diciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdaya guna bagi masyarakat luas (Latifah, 2011).

Prinsip syariah

Prinsip Syariah adalah seperangkat aturan dan nilai-nilai dalam Islam yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan keuangan (Affandi, 2015). Dalam konteks bank sentral dan kebijakan moneter, prinsip syariah memainkan peran penting dalam membentuk kerangka kerja dan orientasi kebijakan yang diimplementasikan oleh lembaga-lembaga keuangan dan pemerintah.

Menurut (Jannah, 2020) Prinsip Syariah adalah seperangkat aturan dan nilai-nilai dalam Islam yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan keuangan. Dalam konteks bank sentral dan kebijakan moneter, prinsip syariah memainkan peran penting dalam membentuk kerangka kerja dan orientasi kebijakan yang diimplementasikan oleh lembaga-lembaga keuangan dan pemerintah (Haryono 2018).

1. Larangan *Riba* (Bunga):

Salah satu prinsip utama dalam syariah adalah larangan terhadap *riba* atau bunga. Dalam konteks kebijakan moneter, ini memiliki implikasi besar terhadap pengaturan suku bunga oleh bank sentral. Bank sentral dalam sistem keuangan Islam harus mempertimbangkan alternatif instrumen kebijakan moneter yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti partisipasi dalam pembiayaan proyek produktif atau investasi yang menghasilkan bagi masyarakat, daripada bergantung pada instrumen keuangan yang melibatkan pembayaran bunga (Hassan, 2004).

2. Prinsip Keadilan Ekonomi:

Prinsip syariah juga menekankan pentingnya keadilan ekonomi dalam distribusi pendapatan dan kekayaan (Khalidun, 1998). Dalam konteks bank sentral dan kebijakan moneter, hal ini dapat tercermin dalam penekanan pada distribusi pendapatan yang lebih merata melalui kebijakan fiskal dan moneter yang memperhatikan kebutuhan masyarakat yang kurang mampu. Bank sentral dapat berperan dalam memastikan bahwa kebijakan moneter mendukung keadilan ekonomi dengan mengendalikan inflasi, mengatur suku bunga yang

BANK SENTRAL DAN KEBIJAKAN MONETER ISLAM YANG SESUAI DENGAN PRINSIP SYARIAH

mempertimbangkan kepentingan semua pihak, dan mendorong investasi produktif yang berdampak positif bagi masyarakat.

3. Penghindaran Spekulasi dan Transaksi yang Tidak Jelas (*Gharar*):

Prinsip syariah juga melarang spekulasi dan transaksi yang tidak jelas atau mengandung ketidakpastian (*gharar*). Dalam konteks kebijakan moneter, bank sentral dalam sistem keuangan Islam harus memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak mendorong spekulasi atau transaksi yang merugikan masyarakat. Ini dapat mencakup pengawasan terhadap pasar keuangan untuk mencegah praktik spekulatif yang berpotensi merusak stabilitas ekonomi dan keuangan.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam pengaturan kebijakan moneter, bank sentral dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomi yang berkelanjutan, sambil memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral dalam Islam. Ini memungkinkan terciptanya sistem keuangan yang lebih stabil, inklusif, dan berkelanjutan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

KESIMPULAN

Dalam konteks kebijakan moneter Islam, bank sentral memegang peran yang krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan, sambil memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba, penekanan pada keadilan ekonomi, dan penghindaran spekulasi, memandu pengaturan kebijakan moneter yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip ini, bank sentral dapat menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif, stabil, dan adil.

Meskipun konsep kebijakan moneter Islam menawarkan pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, implementasinya tidaklah tanpa tantangan. Salah satu keterbatasan utama adalah ketidakpastian dalam menilai kehalalan instrumen keuangan dan aktivitas ekonomi yang kompleks, serta kesulitan dalam membangun kerangka regulasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, adopsi kebijakan moneter Islam dapat menghadapi resistensi dari sektor-sektor tertentu dalam masyarakat dan memerlukan waktu dan upaya yang cukup untuk disosialisasikan dan diimplementasikan.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, diperlukan kerja sama antara lembaga-lembaga keuangan, pemerintah, dan masyarakat sipil dalam mengembangkan kerangka kerja yang memadai untuk kebijakan moneter Islam. Ini melibatkan pendekatan lintas-sektoral dan inklusi dalam proses pengambilan keputusan, serta peningkatan pemahaman dan kesadaran akan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi. Selain itu, diperlukan juga penelitian lebih lanjut dan pertukaran pengetahuan antar negara untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam implementasi kebijakan moneter Islam dan mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi. Dengan langkah-langkah ini, dapat diharapkan bahwa kebijakan moneter Islam dapat lebih efektif dalam mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ajaran Islam.

DAFTAR REFERENSI

- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Sistem Ekonomi Islam (Edisi Mu'tamadah)*. Jakarta: HTI Press, 2005.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Shari'ah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Barro RJ, *Harapan Rasional dan Peran Kebijakan moneter*, Jurnal Ekonomi Moneter, 2(5), 2016.
- Chapra, Umer. 2016. *Sistem Moneter Islam*, Jakarta: Gema. Terj. Hasan A 2009. *Al Qur'an: Menuju sistem Moneter yang Adil*, Terj. Toward a Just Monetary System, Yogyakarta: Dhana Bhakti Prima.
- Chapra, Umer, *Sistem Moneter Islam*, terj. Ikhwani Abidin Bashri, Jakarta: Tazkia Cendekia, 2000
- Daniar. "Transmisi Kebijakan Moneter Syariah: Sebuah Analisa." *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2016): 91.
- Ferry Irawan dan Sugiharso Saufan, *Kebijakan moneter pertumbuhan ekonomi dan pengujian Hipotesis Ekspektasi Rasional dengan analisis VAR*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, Vol. 6 no 1 tahun 2005.
- Hadi Permono, Sjechul, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Economic)*, Makalah Pengantar Matakuliah Makro Ekonomi Islam. PPS IAIN Sunan Ampel Surabaya. Tahun Akademik 2001-2002

BANK SENTRAL DAN KEBIJAKAN MONETER ISLAM YANG SESUAI DENGAN PRINSIP SYARIAH

- Hadi, Sholikhul dan M Romli, *Implikasi Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab terhadap Kebijakan Ekonomi Masa Kini*, Religi Social Education Laa Royba Jurnal, vol 3 no 1, tahun 2021.
- Hanoatubun, Silpa .2020. *Dampak Covid –19 Terhadap Perekonomian Indonesia*.Jurnal EduPsyCouns. (2)1.
- Hapsari,Rindani Dwi dkk, *Analisis Kebijakan Moneter dalam Perspektif Konvensional dan Syariah terhadap Inflasi di Indonesia tahun 2013- 2020*)Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,7(02),2021,STIE AAS.
- Haryono dkk, *Mekanisme pengendalian Moneter dengan inflasi sebagai Sasaran Tunggal*, Buletin
- Haryono dkk, *Mekanisme pengendalian Moneter dengan inflasi sebagai Sasaran Tunggal*, Buletin
- Hassan, Ahmad.2004.*Mata Uang Islam: Telaah komprehensif sistem Keuangan Islam*,Jakarta Radja.
- Hidayat, Maulana. I Made dana.2019. *Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia*. E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana. 9 (1).
- Karim,Adiwarman A.2017.*Ekonomi Makro Islami*,Jakarta: Radja Grafindo,cet 7.
- Karim. Adiwarman Azwar .2001. *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer*,Jakarta: Gema Insani.
- Khaldun,Ibnu. 1988.terj.Umar Hamdan. *al Muqaddimah Beirut*: Dar al Fikr.
- Latifah NA, *Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Syariah*,Jurnal Ekonomi Modernisasi 11(2),124-134.
- Lintangsari, Nastiti Ninda, Nisaulfathona Hidayati, Yeni Purnamasari, dan Hilda Carolina. 2018. *Analisis Pengaruh Instrumen Pembayaran non Tunai Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan di Indonesia*. 1 (1): 1-17.
- Manan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997
- Mansyur, M Ali. “Aspek Hukum Perbankan Syariah Dan Implementasinya Di Indonesia.” Jurnal Dinamika Hukum 11, no. Edsus (2011).

- Maqrobi, Saiful dan Amin P, *Inflasi dan pertumbuhan ekonomi: Uji Kausalitas Inflaton and Economic Growth: Testing for Causality*, Jurnal Dinamika dan Keuangan Perbankan, vol 3 no 1 Mei 2011
- Mishkin, Frederich. 2009. *Ekonomi Uang Perbankan and Financial Market*, Jakarta: Salemba Empat.
- Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2002
- M Sufi, *Penerapan Dinar Stabilitas ekonomi dan Moneter Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, vol 6 no 2, tahun 2020.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, 2005. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Norman, Efrita dkk, *Prinsip Kompensasi dalam Prespektif Islam*, Reslaj, Jurnal Pendidikan Agama Sosial Laa Royba, vol 3 No 1 tahun 2021. 1
- Perry Warjiyo dan Juda Agung, *Mekanisme Transmisi Kebijakan moneter di Indonesia*. Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia, Buletin Ekonomi dan Moneter dan Perbankan, Juni 2008.
- Rahardja, Pratama dan Mandala Manurung, 2008. *Teori Ekonomi Makro*, Jakarta: LPFE UI Depok.
- Rohim, Fathur. 2011. *Mekanisme transmisi Kebijakan Moneter Melalui Suku Bunga SBI sebagai sasaran Operasional Kebijakan moneter dan Variabel Makro Ekonomi Indonesia*. Medan: USU Press.
- Sari, Dian Indah. 2015. *Analisis Terhadap Peranan Dan Strategi Bank Indonesia Serta Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Di Indonesia*. Jurnal Moneter. 2(1)
- Sembodo, Cipto. "Dari Khilafah Ke Nation-States: Transformasi Hukum Islam Era Modern." *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 6, no. 2 (2016): 136–150.
- Sufi, Muhammad. *Penerapan Dinar Stabilitas ekonomi dan Moneter Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, vol 6 no 2, tahun 2020.
- Suni, Nur Sholikhah Putri. 2020. *Kesiapsiagaan Indonesia Menghadapi Potensi Penyebaran Corona Virus Disease*. Jurnal Kesejahteraan Sosial. 12 (3).
- Sutawijaya, A. *Pengaruh faktor faktor Ekonomi terhadap Inflasi Di Indonesia*, Jurnal Organisasi dan Manajemen, 85-101. Wahyudi, Amin. *Jurnal Justitia Islamica*, vol 10 no 1/Jan Juni 2013.

BANK SENTRAL DAN KEBIJAKAN MONETER ISLAM YANG SESUAI DENGAN PRINSIP SYARIAH

Wahyudi, Amien. “*Kebijakan Moneter Berbasis Prinsip-Prinsip Islam.*” *Justicia Islamica* 10, no. 1 (2013): 57–80.

Warjiyo, Perry, and Solikin M Juhro. *Kebijakan Bank Sentral Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2016.